BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu landasan utama dalam konstitusi Indonesia yang mengatur perekonomian nasional adalah Undang-Undang Dasar (“UUD”) 1945 Pasal 33 yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan regional, Indonesia terus beradaptasi dengan mengimplementasikan berbagai reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, dan manufaktur.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Lewat Reformasi Struktural yang Dilakukan Pemerintah, Resiliensi Perekonomian Nasional Terus Berlanjut”.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5553/lewat-reformasi-struktural-yang-dilakukan-pemerintah-resiliensi-perekonomian-nasional-terus-berlanjut>, diakses pada 20 Maret 2025

Salah satu faktor utama yang mendukung reformasi ini adalah masuknya investasi ke dalam perusahaan. Investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi yang masuk ke perusahaan, baik domestik maupun asing, merupakan salah satu pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Melalui aliran investasi ini, perusahaan mampu memperluas kapasitas produksi, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan daya saing di pasar global.³

Pemerintah Indonesia secara aktif menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan deregulasi, pemberian insentif fiskal dan peningkatan infrastruktur. Dalam konteks badan hukum, investasi yang masuk membawa berbagai dampak positif. Pertama, aliran modal asing membantu memperkuat struktur modal perusahaan, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi peluang pertumbuhan baru. Kedua, transfer teknologi dan pengetahuan dari investor asing ke perusahaan lokal meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial. Ketiga, investasi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.⁴

Upaya untuk memperkuat aspek hukum dan regulasi memiliki peran penting dalam menciptakan daya tarik bagi investor, baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks investasi, sinergi antara penegak hukum sangat

³ Kementerian Keuangan, "Indonesia Lanjutkan Reformasi Investasi dan Perdagangan untuk Tingkatkan Daya Saing dan Dorong Pemulihan Ekonomi". <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/295>, diakses pada 20 Maret 2025

⁴ Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Investasi Tangguh Menuju Indonesia Sejahtera". https://jdih-storage.bkpm.go.id/jdih/jdih/BKPM_50th_Book_15x23_Rev-FINAL-.pdf, diakses pada 20 Maret 2025, hal. 95

diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak-hak investor, sehingga diharapkan investasi dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat secara luas. Aturan yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada investor serta melindungi kepentingan nasional. Dalam hal ini, pengembangan hukum investasi di Indonesia harus terus dilakukan untuk menyelaraskan dengan dinamika ekonomi global dan kebutuhan domestik.⁵

Untuk memastikan pengelolaan investasi yang masuk secara efektif, peran perusahaan menjadi sangat penting. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan akan bentuk usaha yang lebih aman dan efisien, adanya Perseroan Terbatas (PT) menjadi solusi yang mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pemilik modal. Struktur PT menawarkan sejumlah keunggulan, seperti fleksibilitas dalam mengelola usaha, kemampuan untuk menarik investasi, perlindungan aset pribadi yang lebih baik, serta tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Selain itu, prestise dan citra yang lebih profesional, kemudahan dalam pengalihan kepemilikan, serta potensi untuk go public atau menarik investor asing menjadikan PT pilihan yang menarik bagi banyak pelaku usaha.⁶

⁵ Nugroho dan Azizy, "Jaminan Kepastian Hukum Investasi" Di SLJ, Vol. 2, No. 2, Agustus 2023, hal.165-178

⁶ Dewi Oktavia dan Irene Svinarky, "Pendirian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", Journal of Criminology and Justice, Vol. 1, No. 3, Juni 2022, hal. 52-57

Sebagaimana R. Ali Rido berpendapat bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.⁷ Saham merupakan bukti kepemilikan atas bagian dari Perseroan Terbatas, sekaligus juga tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas sebagai pemegang saham.⁸

Dalam sejarahnya kita telah mengenal lebih dulu terkait dengan investasi melalui bursa efek. PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan entitas yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli dari efek pihak lain, dengan tujuan untuk memperdagangkan efek tersebut di antara para pihak.⁹ Perlu dicatat bahwa BEI adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan status perseroan terbatas. Proses pendirian BEI berbeda dari pendirian perseroan terbatas pada umumnya, karena BEI tidak didirikan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak untuk menjalankan kegiatan usaha demi memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Sebaliknya, pendirian BEI merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bertujuan untuk menyelenggarakan

⁷ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara*, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, (Bandung: Remadja Karya, 1986), h.335.

⁸ Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum., et.all, *Hukum Perusahaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017), hal. 53.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien. Secara prinsip, BEI di Indonesia berfungsi sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO), yang berarti BEI memiliki wewenang untuk bertindak sebagai regulator atau pembuat peraturan. SRO menjalankan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:¹⁰ (1) Pembuatan peraturan (*rulemaking*) yakni membuat dan menetapkan peraturan yang mengatur tata tertib anggota dan pihak lain yang terlibat; (2) Pengawasan (*supervision*) yakni mengawasi anggota, dan pasar serta memonitor kepatuhan terhadap peraturan; dan (3) Penegakan hukum (*enforcement*) yakni menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dengan cara menyelidiki pelanggaran serta menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar.

Sebagai SRO, BEI memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan efek, salah satunya adalah proses *Initial Public Offering* (IPO), di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat oleh pihak Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) melalui Perantara Pedagang Efek (*Broker Dealer*) yang bertindak sebagai Agen Penjual saham.¹¹

Dalam era digital yang semakin maju, tumbuh sebuah alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Dengan perkembangan Fintech, Pasar Modal perlu turut serta dan bersinergi dalam memanfaatkan Fintech untuk tumbuh berkembang Pasar Modal Indonesia. Penyediaan alternatif tersebut diantaranya adalah layanan urun dana atau *securities crowdfunding* (“SCF”) yang

¹⁰ Bilawal Alhariri Anwar, “Karakteristik Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1, April 2019, hal. 39-49.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Buku Saku Pasar Modal”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%20PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf>, diakses pada 20 Maret 2015, hal. 3.

telah menjadi salah satu metode yang efektif untuk mengumpulkan modal maupun sebagai alternatif investasi untuk para investor. SCF memanfaatkan platform *online* untuk menghubungkan pengusaha, pelaku usaha kecil, atau individu kreatif dengan banyak investor yang tertarik untuk mendanai proyek atau usaha mereka.¹²

Instrumen yang ditawarkan oleh penghimpun dana di SCF memiliki banyak kesamaan dengan instrumen yang tersedia di pasar modal. Namun, penting untuk dicatat bahwa SCF berbeda dari IPO, yaitu akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penawaran dilakukan melalui platform teknologi yang disediakan oleh penyelenggara SCF. Sementara itu, penawaran efek melalui IPO dilakukan melalui bursa efek. Penyelenggara SCF adalah badan hukum yang berbasis di Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan SCF serta telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuk badan usaha penyelenggara SCF dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Dalam hal kewenangan, penyelenggara SCF hanya bertanggung jawab atas layanan SCF yang mereka tawarkan. Penyelenggara SCF tidak berfungsi sebagai SRO seperti bursa efek, karena dalam Peraturan OJK mengenai SCF, tidak ada mandat yang menjadikan penyelenggara SCF sebagai regulator. Kedua, terdapat pembatasan dalam perdagangan saham di pasar sekunder. Dalam skema SCF, perdagangan efek hanya diperbolehkan untuk efek ekuitas, yaitu saham yang telah dibagikan setidaknya 1 (satu) tahun sebelum perdagangan dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan tambahan, antara lain:

¹² Genio Atyanto dan Dony Syarifuddin, "Securities Crowdfunding Sebagai Sumber Pendanaan Alternatif", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. 12, No. 1, 2024, hal. 25-50

- (1) penjualan di pasar sekunder hanya dapat dilakukan antara pemodal terdaftar yang terdaftar di penyelenggara SCF;
- (2) perdagangan efek hanya dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam periode 12 bulan; dan
- (3) jangka waktu pelaksanaan penjualan efek dengan perdagangan efek lainnya harus minimal 6 bulan. Hal ini jelas berbeda dengan mekanisme perdagangan saham di pasar sekunder bursa efek, di mana penjualan efek tidak terikat pada ketentuan pembatasan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saham yang diterbitkan tidak dapat dengan mudah diperjualbelikan oleh perusahaan terbuka di bursa efek.

Ketiga, terdapat pembatasan pada jumlah modal yang dapat dihimpun. Setiap penerbit di SCF diperbolehkan mengumpulkan dana paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam periode 12 (dua belas) bulan. Di sisi lain, penghimpunan dana melalui penawaran efek di bursa berbeda, karena tidak ada batasan jumlah total dana yang dapat dihimpun. Keempat, terkait dengan pembelian efek, SCF secara khusus menetapkan kriteria dan batasan pembelian efek berdasarkan penghasilan pemodal. Ini berbeda dengan penawaran efek di bursa efek, yang tidak menetapkan kriteria atau batasan tersebut. Dengan demikian, siapa pun dapat membeli efek tanpa adanya batasan dalam pembelian.¹³

¹³ Maichle Delpiero, Axel James Setiawan, et.al, "Peran Regulasi Securities Crowdfunding Dalam Mendukung Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia Modeling", Vol. 10, 2023, hal. 12

SCF di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, serta kebutuhan yang besar akan sumber pembiayaan alternatif, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SCF memungkinkan UMKM dan pengusaha pemula untuk mengakses modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka dengan harapan pemilik usaha dapat memperoleh keuntungan lebih.

Investor yang menanamkan modal dapat memperoleh saham sebagai bentuk kepemilikan dalam perusahaan tersebut yang mana ketika investor menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan melalui penawaran saham. Saham ini memberikan beberapa hak kepada investor, seperti:¹⁴

1. Hak atas Dividen, Investor berhak menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen, sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.
2. Hak atas Suara, Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), investor memiliki hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan perusahaan.

RUPS merupakan forum tertinggi di mana pemegang saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan suara, dan membuat keputusan penting yang mempengaruhi arah dan kebijakan perusahaan. Dalam RUPS, berbagai keputusan strategis seperti pemilihan anggota dewan direksi dan

¹⁴ Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H., et. all. *Equity Crowdfunding di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022), hal. 8-17.

komisaris, persetujuan laporan keuangan, pembagian dividen, serta perubahan anggaran dasar perusahaan dibahas dan diputuskan.

Pelaksanaan RUPS diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) di Indonesia. Peraturan ini memastikan bahwa RUPS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi.

Seperti yang diketahui, RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik Perseroan. Setiap rapat, harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya, sehingga agar pelaksanaannya sah menurut hukum harus berada di tempat kedudukannya, seperti yang dijelaskan pada UU PT Pasal 5 ayat (1) tempat kedudukan Perseroan dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan hal itu harus ditentukan tegas dalam Anggaran Dasar. Adapun menurut penjelasan pasal ini, tempat kedudukan Perseroan adalah merupakan Kantor pusat (*Head Office*) Perseroan.¹⁵ Namun, dapat dimungkinkan mengadakan RUPS dimana saja di luar kegiatan usahanya yang utama menurut Pasal 76 ayat (4) dengan syarat bahwa RUPS dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham "menyetujui" Agenda RUPS.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Artinya, Keputusan yang diambil harus disetujui oleh pemegang saham dengan suara bulat.¹⁶

Dengan berkembangnya teknologi informasi, pelaksanaan RUPS juga mengalami inovasi melalui penerapan RUPS Elektronik (E-RUPS). E-RUPS memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam rapat dan pengambilan keputusan secara online, tanpa harus hadir secara fisik, memberikan fleksibilitas yang lebih besar, efisiensi waktu dan biaya, serta meningkatkan partisipasi pemegang saham yang berada di berbagai lokasi geografis.

Pelaksanaan RUPS melalui E-RUPS memang memberikan solusi atas tantangan geografis yang selama ini menghambat partisipasi pemegang saham. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi kendala aksesibilitas fisik bagi pemegang saham yang tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, pemegang saham di wilayah terpencil atau luar negeri seringkali kesulitan menghadiri RUPS secara konvensional karena jarak dan biaya transportasi. Penggunaan teknologi tersebut diakomodir dengan UU PT Pasal 77 ayat 1 yang menyatakan bahwa RUPS dapat diselenggarakan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dengan harus memungkinkan semua peserta RUPS dapat melihat dan mendengar serta berpartisipasi secara langsung dalam rapat. Terkait dengan syarat kuorum dan pengambilan RUPS secara elektronik, sama halnya dengan RUPS konvensional. Rapat Umum Pemegang Saham baik secara fisik

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

maupun elektronik pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan, yang berbeda hanya kehadiran secara fisik atau secara virtual yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi.¹⁷

Perusahaan penerbit yang terlibat dalam SCF juga merasakan dampak positif dari implementasi E-RUPS. Dengan semakin populernya urun dana sebagai alternatif pembiayaan, kebutuhan untuk mengadakan RUPS secara efisien menjadi semakin mendesak. E-RUPS tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memperluas partisipasi pemegang saham, terutama bagi mereka yang berada di lokasi geografis yang berbeda.

Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh E-RUPS, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu meliputi persiapan dan pemanggilan yang sesuai prosedur, pemilihan platform yang terpercaya dengan ketersediaan teknologi yang memadai, keamanan dan kerahasiaan data melalui enkripsi dan verifikasi identitas, transparansi dan akuntabilitas dalam dokumentasi dan pencatatan risalah, fasilitas untuk interaksi dan partisipasi pemegang saham, kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dukungan teknis selama pelaksanaan rapat. Selain itu, Pimpinan/Ketua RUPS harus memperhatikan, bahwa pihak-pihak yang hadir dalam RUPS adalah benar pemegang saham yang bersangkutan yang hadir pada waktu RUPS dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun dengan cara mengubah tampilan atau suara dari peserta RUPS secara elektronik.¹⁸

¹⁷ Hafit Rusli, "Urgensi Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Di Tengah Pandemi Covid-19", *DHARMASISYA* Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 1, Maret 2022, hal. 413-424

¹⁸ *Ibid.*

Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan salah satu transaksi elektronik yang dimaksud dalam UU Nomor 11 tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasilnya adalah berupa Informasi Elektronik/Risalah RUPS dibuat dalam Dokumen Elektronik. Dalam Pasal 77 ayat 4 UU PT, menyebutkan setiap penyelenggaraan RUPS secara elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda-tangani oleh semua peserta RUPS. Penanda-tanganan di sini dimaksudkan adalah baik secara fisik maupun secara elektronik¹⁹. Dalam hal risalah rapat tersebut dibuat oleh notaris sebagai Berita Acara Rapat, risalah tidak perlu ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana dinyatakan pada Pasal 90 ayat 1 dan 2 UUPT. Selain itu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharuskan adanya kehadiran fisik dari pihak yang menghadap notaris.²⁰

Sehingga dalam pembuatan risalah rapat yang dibuat oleh notaris tersebut, terdapat tanggung jawab yang besar bagi notaris sebagai penjaga keabsahan proses ini. Notaris memiliki peran yang penting dalam memastikan pelaksanaan E-RUPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia harus memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur telah diikuti dengan benar, serta bahwa keputusan yang diambil dalam E-RUPS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS konvensional. Kehadiran notaris dalam E-RUPS juga

¹⁹ M. Ghalil Ghibran, Pelaksanaan Rups Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. I, No. 2, Mei 2022, hal. 9.

²⁰ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 51

bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks layanan urun dana, di mana transparansi dan kepercayaan sangat penting bagi investor, peran notaris menjadi semakin esensial.

Ada banyak pertanyaan terkait pelaksanaan RUPS secara elektronik yang dihadiri oleh notaris, terutama mengenai apakah notaris harus hadir secara fisik di lokasi RUPS atau boleh hadir melalui media elektronik, serta bagaimana menentukan tempat pelaksanaan RUPS. Kurangnya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan RUPS elektronik untuk Perseroan Tertutup yang menjadi Penerbit melalui Layanan Urun Dana membuat banyak notaris enggan membuat akta RUPS elektronik secara langsung.

Masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan E-RUPS, terutama terkait dengan aspek teknis dan hukum. Ketidakjelasan regulasi, keterbatasan teknologi, serta hambatan dalam verifikasi identitas pemegang saham adalah beberapa isu yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan E-RUPS pada perusahaan penerbit pada layanan urun dana, serta mengeksplorasi solusi untuk mengatasi tantangan yang ada.²¹

²¹ Rizkianti, W, Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya), *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 83–98.

1.2. Rumusan Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan Pokok Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana regulasi yang berlaku mengatur Pelaksanaan E-RUPS pada Perusahaan Penerbit Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi?
- 2) Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta E-RUPS pada Perusahaan Penerbit Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan dengan cara mengkaji regulasi terkait pelaksanaan RUPS pada perusahaan penerbit melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui media elektronik.
- 2) Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai kendala-kendala yang dapat dihadapi Notaris sehubungan dengan tanggung jawab dan kewenangan Notaris dalam membuat Akta RUPS pada perusahaan penerbit melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan melalui media elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya mengisi kekosongan hukum, karena tidak adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 Ayat 4 mengenai pembuatan RUPS secara elektronik pada perusahaan penerbit efek melalui layanan urun dana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik notaris, kalangan akademisi maupun perusahaan penerbit melalui layanan urun dana yang berniat melakukan RUPS secara elektronik serta kendala-kendala yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat dipahami secara menyeluruh serta memudahkan pembahasan penelitian tesis ini, maka Penulis membagi penelitian hukum ini menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan Teori membahas mengenai Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum. Sedangkan untuk Tinjauan Konseptual akan dibahas mendalam Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini, yang terdiri atas Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) elektronik

perusahaan penerbit melalui layanan urun dana berbasis teknologi, analisis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta RUPS pada perusahaan yang diselenggarakan melalui media elektronik, serta analisis mengenai kendala penerapan E-RUPS perusahaan secara elektronik dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Notaris.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap permasalahan penelitian, berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Penulis juga memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan kesimpulan yang diuraikan dalam bab ini.